



PEMKOT PETAKAN ULANG LOKASI PARKIR Tidak Semua TJU Diterapkan Tarif Progresif

YOGYA (KR) - Meski dalam rancangan peraturan daerah (raperda) terkait penyelenggaraan perparkiran diatur mengenai sistem tarif progresif, namun tidak akan diberlakukan di semua tepi jalan umum (TJU). Pemkot Yogya kini berupaya memetakan ulang lokasi parkir yang akan dituangkan dalam peraturan walikota (perwal).

Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogya Wirawan Haryo Yudho, mengungkapkan sistem pengelolaan parkir secara detail sudah dituangkan dalam raperda. Hanya, tetap dibutuhkan perwal sebagai tindak lanjut yang mengatur secara teknis. "Termasuk pemanfaatan teknologi untuk pelayanan parkir serta sistem tarif progresif, sudah dituangkan. Ketika nanti sewaktu-waktu dibutuhkan perangkat teknisnya, maka sudah ada dasar hukumnya," jelasnya, Selasa (6/11).

Raperda induk terkait perparkiran tersebut sudah selesai dibahas dan saat ini tengah dimintakan evaluasi ke Gubernur DIY. Selain menyangkut sistem pengelolaan, juga digulirkan dua raperda turunan yakni retribusi TJU dan retribusi Tempat Khusus Parkir (TKP). Diharapkan ketiga raperda tersebut dapat disahkan tahun ini sehingga segera dijadikan acuan.

Sementara Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Yogya Imanudin Aziz, menjelaskan mekanisme perhitungan tarif progresif idealnya menggunakan

peralatan teknologi. Hal ini lantaran untuk mengukur durasi lama parkir kendaraan serta menghitung besaran biaya yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa. Hanya, jika tarif progresif di area TJU membutuhkan peralatan khusus seperti Terminal Parkir Elektronik (TPE) karena lokasinya terbuka. Berbeda dengan TKP yang keluar dan masuk kendaraan berada di satu pintu. "Saat ini kan kita belum memiliki TPE. Jika kemudian hari peralatan itu dibutuhkan, juga tinggal pengadaan karena dasar hukumnya sudah ada," tandasnya.

Namun demikian, pengadaan TPE ditengarai tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Hal ini lantaran berdasarkan studi di daerah lain yang sudah menerapkan seperti Bandung dan Batam, terdapat berbagai masalah sosial. Oleh karena itu, potensi masalah tersebut perlu diantisipasi terlebih dahulu agar kelak benar-benar siap.

Sedangkan sembari menunggu kesiapan tersebut, Dinas Perhubungan akan mengusulkan perwal untuk menentukan lokasi TJU yang bisa diterapkan tarif parkir progresif. Dalam perwal juga akan diatur mekanisme perhitungan tarif progresif. "Tidak semua TJU bisa progresif, hanya kawasan yang masuk dalam zona premium. Begitu raperda disepakati, kami akan susulkan perwalnya supaya bisa segera diberlakukan," jelas Aziz. (Dhi) -c

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005